

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Zainal Abidin. 2021. *“Antologi Teori Sosial: Kumpulan Karya-Karya Pilihan”*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Andi Zastrawati. 2023. *“Penguatan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Melalui Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi”*. TASKAP LEMHANNAS RI.
- Bacon & Irawan. 2000. *“Kiat Sukses Meraih Hibah Penelitian Pengembangan”*. Yogyakarta: Deepublish.
- Desa, Melkianus. 2023. *“Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir di Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang”*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
- Efendi, Jonaedi & Prasetijo Rijadi. 2016. *“Edisi Kedua: Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Jakarta: Kencana.
- Fatmawatie, Hj. Naning. 2017. *“Tanggungjawab Sosial Perusahaan”*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Faguet, J.P. 2023. *“Decentralised Governance: Crafting Effective Democracies Around the World”*. London: LSE Press.
- Fendri, Azmi. 2021. *“Hukum Pemerintahan Daerah”*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Mohammad. 2015. *“Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan”*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Muluk, M.R. Khairul. 2003. *“Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah”*. Surabaya: ITS Press.

- Nasution, S. & Thomas, M. 1988. "*Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*". Bandung: Jemmars.
- Pertiwi, Nurlita. 2017. "*Implementasi Sustainable Development di Indonesia*". Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Setiawati, Anisa Deny. 2015. "*Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Pencabutan IUP Operasi Produksi*". Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sedarmayanti. 2004. "*Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*". Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi. 2003. "*Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarto. 1990. "*Metode Penelitian Deskriptif*". Surabaya: Usaha Nasional.
- Tim Lapera. 2001. "*Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*". Jakarta: Lapera Pustaka Utama.

## **B. Jurnal**

- Ainia, Dela Khoirul. "Menciptakan Keadilan Lingkungan bagi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemahaman Etika Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Al Farisi, Muhammad Salman. "Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura" "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 38, 2023.
- Andi, Feri. "Peran Pendidikan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Oku Timur, *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2024.

- Arizona, Yance. “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No. 3, 2011.
- Atip Latipulhayat. Editorial: “Politik Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Desentralisasi atau Resentralisasi?” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 3. 2015. Diakses pada 12 Juli 2025 dari <https://journal.unpad.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=pjih>.
- Batubara, M. Y. “Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 25, No. 1. 2012.
- Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 10. No. 3. 2022.
- Dilla Maulida, et al. Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1. 2023
- Elwan, La Ode Muhammad, et al. “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Publicho*, Vol.1, No.3, 2018
- Erawati, Ni Kadek Ita, et al. “Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung”, *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10, No. 3, 2019.
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Gultom, Ignasius. et al, “Kajian Degradasi Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan Untuk Pengambilan Fungsi Lahan”, *Journal Agrium*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Hakim, H. (2022). Sinergi Antara Good Government dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Dialektika*, Vol. 7, No. 2. 2022.

- Isnaeni, Diyan. “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- López-Carrión, Alberto E., and Myriam Martí-Sánchez. 2024. “Press Discourse on the SDGs and the 2030 Agenda in Spain: Analysis of the Digital Newspapers with the Highest Readership (2015-2022).” *El Profesional de La Información* 33 (3): 1–28. doi:10.3145/epi.2024.0310.
- Mina, Risno. “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* 9 (2016): 149–165.
- Munawar, at al. Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3. No. 2. 2021.
- Natalia, Angga, and Erine Nur Maulidya. "Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8.1 (2023): 21-41.
- Noorsanti, Inggal Ayu, dan Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Oematan, Naldi Edison. "Implementasi Asas Kebermanfaatan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Kupang Timur." *Justitia et Pax* 40.2 (2024): 265-293.
- Otong Syuhada. “Partisipasi Masyarakat dan Proses Pembangunan di Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 10. No. 1. 2024.
- Prapti Rahayu, D., & Faisal. Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, Vol. 16. No.1. 2021.

- Prasetyo, Pius S. “Desentralisasi Dan Demokratisasi Di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1, 2005.
- Putra, Anggi Aran, Hayati Sari Hasibuan, Rudy Parluhutan Tambunan, and Lisa Meidiyanti Lautetu. "Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia." *Sustainability (2071-1050)* 16, no. 23 (2024).
- Rachmad, Alfarid Fadhil, et al. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02 (2023): 75-88.
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. "Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta Research Law Journal* 16.1 (2021): 164-172.
- Robuwan, Rahmat. “Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Rooyen, Marlie van. “Structure and Agency in News Translation: An Application of Anthony Gidens’ Structuration Theory.”, *Southern African Linguistics and Applied Language Studies*, (2013): 497–498.
- Satriawan, Desman Diri. “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal: Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Siti Nur Solechah. Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IV No. 12. 2012.
- Sofi, Muhammad, dan Raoul Susanto. “Analisis Izin Berusaha Pertambangan Mengenai Penghapusan IUP dan IUPK di Otoritas Ibu Kota Nusantara”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Sianturi, A. Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2. No. 8. 2023.
- Suhartono, Slamet. “Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, 2013.

Sukmana, Oman. “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Susetio, Wasis, dkk. “Penerapan Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (Mapp) Di Sektor Pertambangan Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 1, 2021.

Taher, Salbia, dan Antje Tuasela. “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika”, *Jurnal Kritis*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Utami, N. E. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Lex Renaissance*, Vol. 2. No. 8. 2023.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019–2024.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### D. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, “Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kupang (Ribu Rupiah), 2023” diakses melalui link <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcxMCMY/pendapatan-pemerintah-kabupaten-kupang.html>, pada 08 November 2024

BPS Nusa Tenggara Timur. Data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota. Diakses melalui link <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>, pada 10 April 2024.

Canra Liza, “Kehutanan Jadwalkan Periksa WIUP Galian C di Kabupaten Kupang”, (Lintasntt.com, 24 April 2024), diakses melalui link <https://www.lintasntt.com/kehutanan-jadwalkan-periksa-wiup-galian-c-di-kabupaten-kupang/>, pada tanggal 20 April 2025.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Kebijakan UU NO 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)” diakses melalui link <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>, pada tanggal 12 Juli 2025.

Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi*. Diakses melalui link [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13081/2/D\\_9020060\\_02\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13081/2/D_9020060_02_BAB%20II.pdf), pada 12 April 2024.

Henry R. West & Brian Duignan, “Utilitarianism Philosophy”, Encyclopedia Britannica, diakses melalui link <https://translate.google.com/translate?u=https://www.britannica.com/topic/utilitarianism->

[philosophy&hl=id&sl=en&tl=id&client=wa&prev=search](#), pada 6 Juni 2024.

<https://kupangkab.go.id/#menu4> diakses pada 15 April 2024.

<https://ntt.bps.go.id/indicator/23/35/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>, pada 10 April 2024.

Irfan Fadhlurrahman, “12,08% Penduduk Kab. Kupang Lulusan SMP Pada Desember 2024”, (Databoks, 02 Mei 2025), diakses melalui link <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a84f1b630f73e25/1208-penduduk-kab-kupang-lulusan-smp-pada-desember-2024>, pada 18 Mei 2025.

Minerba One Map Indonesia-ESDM. Diakses melalui link <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, pada 25 April 2024.

Mochamad Januar Rizki, “Risiko Hilangnya Sejumlah Kewenangan Daerah dalam UU Minerba”, (Hukumonline, 4 Agustus 2020), diakses melalui link <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba-1t5f28c9fd2e91/>, pada tanggal 20 Mei 2025.

Nur Aulia Arianto. L, “Konsep Desentralisasi, Dekonstruksi, Dan Otonomi Daerah”, (2022, April 17), diakses melalui link <https://osf.io/preprints/osf/78qts>, pada tanggal 10 april 2024.

Teori Strukturasi Dari Anthony Giddens dalam Dr. Argyo Demartoto, M.Si. (2013), diakses melalui link [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13081/2/D\\_9020060\\_02\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13081/2/D_9020060_02_BAB%20II.pdf).

Utami Argawati, “Ahli: Pengelolaan pertambangan oleh Pemerintah Pusat adalah Kemunduran”, (mkri.id, 21 Februari 2023), diakses melalui link <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17999&menu=2>, pada 13 April 2025.